STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI DIGITAL DI DESA BUMI MULYA KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi Negara

OLEH :
ERVA ADE USTARI
NPM.220411026

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

PENsGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 17
Bulan : Juni
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA	SEKRETARIS
SARJAN M, S.Sos,M.Si	**EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si**
NIDN.100128002	**NIDN. 10020559002**

1	**SAHRI MUHARAM, S.Sos.M.Si**	**(Pembimbing 2)**	( )
2	**DESRIADI, S.Sos.M.Si**	**(Anggota)**	( )
3	**RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si**	**(Anggota)**	( )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

SARJAN M, S.Sos,M.Si
NIDN. 100128002

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL	:	STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI DIGITAL DIDESA BUMI MULYA KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NAMA	:	ERVA ADE USTARI
NPM	:	220411026
UNIVERSITAS	:	ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS	:	ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI	:	ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
EMILIA EMHARIS.S.Sos.,M.Si.	**SAHRI MUHARAM.S.Sos.,M.Si.**
NIDN.1002059002	**NIDN.1021117906**

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

ALSAR ANDRI,S,Sos.,M.Si
NIDN.1005108901

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: ERVA ADE USTARI
NPM	: 220411026
Fakultas	:Ilmu Sosial
Program Studi	: Administrasi Negara
Universitas	: Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **Strategi Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Transformasi Digital Di Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Taluk Kuantan,27 april 2026
Yang Membuat Pernyataan



ADE USTARI
NPM:220411026

MOTO HIDUP

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah,tetapi Allah Berjanji,bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

“ Setetes keringat orang tuaku yang keluar,ada seribu langkahku untuk maju”

“Perang telah usai,aku bisa pulang
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!!! ”
(Nadin Amizah)

KATA PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT,Atas berkat rahmat dan Karunia-Nya yang diberikan,Dengan penuh rasa syukur dan cinta, karya ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, pengorbanan yang tak terhitung, serta kasih sayang yang selalu menguatkanku dalam setiap langkah. Kalian adalah alasan aku bertahan, bangkit, dan terus berjuang hingga sampai di titik ini.

Untuk diriku sendiri, terima kasih karena telah berani melangkah sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah, meski sering merasa lelah dan ragu. Semua air mata, usaha, dan perjuangan ini akhirnya terbayar. Ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar.

Semoga apa yang telah diraih hari ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik, serta dapat membanggakan dan membahagiakan orang-orang tercinta

ABSTRAK

STRATEGI PEMERINTAH DESA BUMI MULYA DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI DIGITAL DI DESA BUMI MULYA KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUATAN SINGINGI

ERVA ADE USTARI
220411026

Penelitian ini berjudul "Strategi Pemerintah Desa dalam Menghadapi Transformasi Digital di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi." Latar belakang penelitian ini berangkat dari tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menghadapi era digitalisasi, di mana masih terdapat keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan literasi digital di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mendeskripsikan strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Bumi Mulya dalam merespon transformasi digital, serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala desa,sekretraris desa,operator desa,kasi dan masyarakat Desa Bumi Mulya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa Bumi Mulya dalam menghadapi transformasi digital belum berjalan secara optimal,karena masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur digital.

Kata Kunci : Strategi Desa, Transformasi Digital,Pemerintah Desa

ABSTRACK

VILLAGE GOVERMENT STRATEGY IN FACING DIGITAL TRANSFORMATION IN BUMI MULYA VILLAGE,LOGAS TANAH DARAT DISTRICT KUANTAN SINGINGI REGENCY

ERVA ADE USTARI
220411026

This research is titled "Village Government Strategy in Facing Digital Transformation in Bumi Mulya Village, Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency." The background of this research starts from the challenges faced by the village government in facing the digitalization era, where there are still limitations on infrastructure, human resources, and digital literacy at the village level. This research aims to identify and describe the strategies carried out by the Bumi Mulya Village Government in responding to digital transformation, as well as analyzing the obstacles faced in the process. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The research informant consists of the village head, village secretary, village operator, kasi and Bumi Mulya Village community,The results show that the strategy of the Bumi Mulya Village Government in facing digital transformation has been implemented fairly well, but is not yet optimal due to limitations in human resources and digital infrastructure.

Keywords : Village strategy, digital transformation, village government

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari penelitian ini adalah "Strategi Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Transformasi Digital Di Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupeten Kuantan Singingi".

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan banyak terima kasih.

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak Sarjan M, S,Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak Alsar Andri.Sos., M.Si Selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbin I, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan saran dalam menyelesaiakan usulan penelitian ini.
5. Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M,Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan saran dalam menyelesaikan proposal ini.
6. Bapak Emilia Emharis M, S,Sos., M.Si selaku dosen pembimbing akademik
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
8. Seluruh Staff, karyawan tata usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

9. Kepada teman-teman seperjuangan Administrasi Negara kelas A Angkatan 2022, terimakasih atas motivasi dan bantuannya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu,membimbing dan memberikan masukan serta dorongan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulis ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga apa yang terkandung dalam penulisan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga ilmu yang didapatkan menjadi keberkahan bagi kita semua.

Taluk Kuantan, 1 November 2026

ERVA ADE USTARI
NIM.220411026

DAFTAR ISI

Halaman:

TANDA PERSETUJUAN i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... ii

MOTO HIDUP iii

KATA PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACK iv

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah..... 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 7

1.4.1 Manfaat Teoritis 7

1.4.2 Manfaat Praktis..... 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA 8

2.1 Kajian Pustaka 8

2.1.1 Teori Administrasi Negara 8

2.1.2 Teori Kebijakan 10

2.1.3 Teori Manajemen Strategis..... 13

2.1.4 Teori Transformasi Digital 15

2.1.5 Teori Sistem Informasi Manajemen 18

2.1.6 Teori Pemerintah Desa 19

2.1.7 Teori Konsep Pemerintah Desa 22

2.2 Kerangka Pemikiran 23
2.3 Hipotesis 24
2.4 Definisi Operasional 24
2.4.1 Strategi Pemerintah Desa 24
2.4.2 Transformasi Digital 25
2.4.3 Pemerintah Desa 25
2.5 Operasional Variabel 26
BAB III METODE PENELITIAN 27
3.1 Jenis Penelitian 27
3.2 Informan 28
3.3 Sumber Data 30
3.3.1 Data Primer 30
3.3.2 Data Skunder 30
3.4 Fokus Penelitian 30
3.5 Lokasi Penelitian 31
3.6 Metode Pengumpulan Data 31
3.6.1 Wawancara 31
3.6.2 Obserevasi 31
3.6.3 Dokumentasi 31
3.7 Metode Analisis Data 32
3.7.1 Reduksi Data 32
3.7.2 Penyajian Data 32
3.7.3 Penarikan Kesimpulan 33
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian 34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 35
4.1 Gambaran Umum Desa Bumi Mulya 35
4.2 Demografi 36
4.2.1 Batas Wilayah Desa 36
4.2.2 Luas Dan Jarak Wilayah 36
4.2.3 Pendudu 37
4.2.4 Keagamaan 37

4.2.5 Fasilitas Umum 39
4.3 Kondisi Pemerintah Desa Bumi Mulya 39
4.4 Strategi Pemerintah Desa Dalam MenghadapiTransformasi Digital 41
4.5 Faktor Pendukung Dan Penghambat Transformasi 43
4.5.1 Faktor Pendukung Transformasi Digital 43
4.5.2 Faktor Penghambat Transformasi Digital..... 43
4.5.3 Struktur Organisasi Desa Bumi Mulya..... 44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45
5.1 Identitas Responden..... 45
5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin..... 45
5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia..... 46
5.1.3 Tingkat Pendidikan..... 46
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Strategi Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Transfomrasi Digital Di Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi 47
5.2.1 Kesiapan Sumber Daya Manusia..... 47
5.2.1.1 Pertanyaan Pertama Kesiapan Sumber Daya Manusia..... 47
5.2.1.2 Pertanyaan Kedua Sumber Daya Manusia..... 49
5.2.1.3 Pertanyaan Ketiga Sumber Daya Manusia..... 51
5.2.1.4 Pertanyaan Ke Empat Sumber Daya Manusia 52
5.2.2 Infrastruktur Digital..... 54
5.2.2.1 Pertanyaan Pertama Infrastruktur Digital..... 54
5.2.2.2 Pertanyaan Kedua Infrastruktur Digital 56
5.2.2.3 Pertanyaan Ketiga Infrastruktur Digital 58
5.2.2.4 Pertanyaan Ke Empat Infrastruktur Digital..... 59
5.2.3 Kepemimpinan dan Arah Kebijakan Desa 61
5.2.3.1 Pertanyaan Pertama Kepemimpinan dan Arah Kebijakan Desa..... 61

5.2.3.2 Pertanyaan Kedua Kepemimpinan dan Arah Kebijakan Desa 63
5.2.3.3 Pertanyaan Ketiga Kepemimpinan dan Arah Kebijakan Desa 65
5.2.3.4 Pertanyaan Ke empat Kepemimpinan dan Arah Kebijakan Desa 66
5.2.4 Pelaksanaan Strategi Transformasi Digital 68
5.2.4.1 Pertanyaan Pertama Pelaksanaan Strategi Transformasi Digital 68
5.2.4.2 Pertanyaan Kedua Pelaksanaan Strategi Transformasi Digital 70
5.2.4.3 Pertanyaan Ketiga Pelaksanaan Strategi Transformasi Digital 72
5.2.5 Hambatan Dalam Transformasi Digital 74
5.2.5.1 Pertanyaan Pertama Hambatan Dalam Transformasi Digital 74
5.2.5.2 Pertanyaan Kedua Hambatan Dalam Transformasi Digital 76
5.2.5.3 Pertanyaan Ketiga Hambatan Dalam Transformasi Digital 78
5.2.6 Solusi dan Upaya Perbaikan 79
5.2.6.1 Pertanyaan Pertama Solusi dan Upaya Perbaikan . 79
5.2.6.2 Pertanyaan Kedua Solusi dan Upaya Perbaikan 81
5.2.6.3 Pertanyaan Ketiga Solusi dan Upaya Perbaikan 83
5.3 Analisis 85
BAB VI PENUTUP 89
6.1 Kesimpulan 89
6.2 Saran 89
DAFTAR PUSTAKA 91

DAFTAR TABEL

Tabel: Halaman:

2.1 : Konsep Variabel Strategi Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Transformasi Digital di Desa Bumi Mulya Kecamtan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi 23

3.1 : Informan Penelitian Strategi Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Transformasi Digital Di Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. 29

3.2 : Jadwal kegiatan penelitian tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Transformasi Digitaal Di Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi 34

4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 37

4.2 : Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Bumi Mulya 38

4.3 : Jumlah Rumah Ibadah Desa Bumi Mulya 38

4.4 : Jumlah fasilitas Umum di Desa Bumi Mulya.....39

5.1 : Identitas Informan berdasarkan jenis kelamin 45

5.2 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia 46

5.3 : Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar: Halaman :

2.1 : Kerangka pemikiran tentang Srategi Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Transformasi Digital Di Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat.....21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi pendorong utama perubahan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan di seluruh dunia. Dalam satu dekade terakhir, digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak di hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk pemerintahan. Di Indonesia, transformasi digital menjadi prioritas nasional yang diwujudkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Program ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat dan akurat kepada masyarakat.

Transformasi digital tidak hanya diperuntukkan bagi instansi pemerintahan pusat dan daerah, tetapi juga harus diterapkan hingga tingkat pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat akar rumput. Desa menjadi tempat di mana kebijakan pemerintah secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital di tingkat desa akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal.

Namun demikian, penerapan transformasi digital di tingkat desa tidak semudah di wilayah perkotaan. Banyak desa di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis. Keterbatasan jaringan internet, kurangnya fasilitas pendukung, rendahnya literasi digital aparatur pemerintahan,

serta minimnya pendampingan dari pemerintah daerah menjadi tantangan serius yang menghambat percepatan digitalisasi desa. Tantangan tersebut juga dirasakan oleh Desa Bumi Mulya yang berada di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Secara geografis, Desa Bumi Mulya tidak berada di daerah terpencil, namun secara infrastruktur digital masih tertinggal. Berdasarkan observasi awal, kegiatan administrasi di desa ini sebagian besar masih dilakukan secara manual. Pengurusan surat-menyurat, pencatatan data penduduk, serta pelaporan kegiatan belum terintegrasi dalam sistem digital. Bahkan, media komunikasi desa dengan masyarakat masih bersifat konvensional, seperti melalui papan informasi dan komunikasi langsung dari aparat desa.

Dari sisi sumber daya manusia, aparatur desa juga menghadapi keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi. Sebagian perangkat desa belum terbiasa menggunakan komputer, e-mail, atau platform digital lainnya dalam mendukung pekerjaan administrasi. Rendahnya literasi digital masyarakat pun memperparah keadaan, karena mereka belum sepenuhnya memahami manfaat teknologi dalam mempercepat dan mempermudah akses layanan publik.

Padahal, dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, desa dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, serta menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan program pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Bumi Mulya perlu menyusun strategi yang komprehensif dan kontekstual agar transformasi digital dapat berjalan secara terencana dan berkelanjutan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa desa ini masih menghadapi beberapa kendala utama, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi, lemahnya infrastruktur jaringan internet, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Desa Bumi Mulya telah dan sedang menyusun berbagai strategi adaptif guna mempercepat proses digitalisasi pelayanan publik di lingkungan desa. Berikut ini merupakan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bumi Mulya dalam menghadapi transformasi digital:

1. Penetapan Visi dan Arah Pembangunan Digital Desa
2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Desa
3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Digital
4. Pengembangan Sistem Informasi dan Pelayanan Digital
5. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat
6. Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan
7. Evaluasi dan Pengendalian Strategi Digital

Pemerintah Desa Bumi Mulya telah merumuskan sejumlah strategi dalam menghadapi transformasi digital. Namun, strategi yang paling relevan dan berdampak langsung terhadap masyarakat adalah pengembangan sistem informasi dan pelayanan publik berbasis digital. Strategi ini dipandang sebagai inti dari transformasi digital desa karena berkaitan langsung dengan pengelolaan administrasi pemerintahan, penyediaan layanan publik, serta akses masyarakat terhadap informasi desa.

Pengembangan sistem informasi dan pelayanan digital diwujudkan melalui penerapan Sistem Informasi Desa (SID), digitalisasi administrasi surat-menyurat, penyediaan website resmi desa, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana pelayanan dan komunikasi publik. Melalui strategi ini, pemerintah desa diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan, mengurangi ketergantungan pada sistem manual, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa strategi pengembangan sistem informasi dan pelayanan publik berbasis digital di Desa Bumi Mulya belum berjalan secara optimal. Meskipun fasilitas dan sistem digital telah tersedia, pelayanan administrasi masih didominasi oleh cara konvensional. Sistem Informasi Desa belum dimanfaatkan secara maksimal, pengelolaan data belum terintegrasi dengan baik, dan layanan digital belum sepenuhnya menjadi pilihan utama masyarakat dalam mengurus administrasi desa.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem digital, rendahnya literasi digital masyarakat, serta minimnya sosialisasi terkait penggunaan layanan berbasis online. Akibatnya, pengembangan sistem informasi dan pelayanan digital belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Desa Bumi Mulya.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pengembangan pelayanan publik berbasis digital dengan realitas pelaksanaannya di tingkat desa. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi dan pelayanan digital menjadi

strategi yang penting untuk dikaji secara mendalam agar dapat diketahui sejauh mana efektivitas pelaksanaannya, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan.

Penerapan strategi tersebut diharapkan dapat membantu Desa Bumi Mulya bertransformasi menuju pemerintahan digital yang efisien dan akuntabel. Namun kenyataannya, hingga saat ini penerapan strategi tersebut masih belum berjalan optimal. Minimnya koordinasi antara pemerintah desa dengan pihak kabupaten, keterbatasan pendanaan, serta kurangnya pendampingan teknis menjadi faktor penghambat utama.

Akibatnya, berbagai dampak negatif muncul, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, pelayanan publik menjadi tidak efisien, waktu pengurusan administrasi menjadi lama, dan potensi kesalahan administratif meningkat. Dalam jangka panjang, desa berpotensi tertinggal dalam hal pengelolaan data, pembangunan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Desa yang tidak siap secara digital akan sulit berkompetisi dengan desa lain yang sudah lebih maju dan terintegrasi dalam sistem informasi nasional.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa urgensi transformasi digital di Desa Bumi Mulya sangat tinggi. Pemerintah desa tidak hanya dituntut untuk mampu mengelola pemerintahan secara manual, tetapi juga harus mampu berinovasi dalam menghadapi perubahan era digital. Dibutuhkan langkah-langkah strategis yang disusun secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Selain itu, keberhasilan strategi transformasi digital juga bergantung pada partisipasi masyarakat desa. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat,

tetapi juga harus dilibatkan sebagai subjek dalam proses digitalisasi. Sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat teknologi perlu dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat dapat menerima perubahan dengan positif.

Melalui penelitian ini, penulis ingin menggali dan menganalisis bagaimana strategi Pemerintah Desa Bumi Mulya dalam menghadapi transformasi digital, apa saja kendala yang dihadapi, serta langkah apa yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan proses digitalisasi di tingkat desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan dan kebijakan publik, serta manfaat praktis bagi pemerintah desa dan daerah dalam merancang strategi digital yang adaptif terhadap kondisi lokal.

Dengan adanya strategi yang jelas, terukur, dan realistis, Desa Bumi Mulya diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat. Transformasi digital bukan sekadar tentang penggunaan teknologi, melainkan tentang perubahan budaya kerja pemerintahan desa menuju arah yang lebih modern, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian berjudul “Strategi Pemerintah Desa dalam Menghadapi Transformasi Digital di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi” menjadi penting dan relevan untuk dilaksanakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang adaptif dan siap menghadapi tantangan era digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam tugas akhir ini adalah: Bagaimana strategi pemerintah desa bumi mulya dalam menghadapi transformasi digital di desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Sigingi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk strategi apa saja yang dikembangkan oleh pemerintah Desa Bumi Mulya dalam merespon dan menghadapi transformasi digital di Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Sigingi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pembangunan ilmu pemerintahan dan kebijakan publik, khususnya dalam memahami strategi pemerintah desa menghadapi transformasi digital serta memperkaya literatur tentang digitalisasi di tingkat desa

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi pemerintah desa bumi mulya Menjadi acuan dalam merancang strategi digitalisasi yang efektif dan sesuai kondisi lokal kemudian,Bagi pemerintah daerah Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan program pembinaan desa berbasis digital adapun manfaat Bagi masyarakat adalah Mendorong pelayanan publik yang lebih cepat,transparan,dan partisipasi dan Bagi akademik Menjadi relevansi bagi penelitian selanjutnya terkait digitalisasi pemerintah desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1Teori Administrasi Negara

Menurut Aneta (2012:3)ilmu administrasi negara pada dasarnya adalah mempelajari seluruh kegiatan atau proses mengenai kerjasama di antara manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan yang berupa kerjasama tersebut sifatnya umum dalam arti telah ada sejak jaman dahulu sampai sekarang. Kerjasama itu sendiri sifatnya dapat menjurus kearah pencapaian tujuan pribadi (privat) dan dapat pula menjurus kearah pencapaian tujuan masyarakat (publik).

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya ilmu adminisirasi berorientasi kepada pencapaian tujuan yang bersifat privat disebut dengan istilah "Administrasi Privat/Niaga". Sedangkan ilmu administrasi yang berorientasi kepada pencapaian tujuan masyarakat disebut dengan istilah "Administrasi Publik/Negara". Dengan demikian tidak heranlah apabila seluruh konsep, teori atau sistem analisis dari ilmu administrasi digunakan atau berlaku pula dalam administrasi niaga atau administrasi negara. Menurut Felix A. Nigro (dalam Aneta, 2012:3) berpendapat bahwa: Administrasi negara adalah usaha kelompok yang bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik.Administrasi negara kegiatannya meliputi tiga bidang yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif dan satu bidang dengan bidang lainnya berhubungan erat. Administrasi negara mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijaksanaan publik dan merupakan bagian proses politik.

Administrasi negara sangat berbeda dengan administrasi niaga.Administrasi negara berhubungan erat dengan kelompok niaga dan individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Nugraha (2022:17) administrasi negara merupakan sebuah sistem yang dipakai suatu negara guna membantu pemerintahan dalam melengkapi keperluan masyarakat. Pada kehidupan modern seperti saat ini, negara lebih mengarah untuk berusaha memenuhi keperluan masyarakat, terutama dalam permasalahan pelayanan kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan adanya admnistrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut.

Dalam hal ini, administrasi negara selalu berupaya menata segenap aspek yang terdapat pada aktivitas negara seperti birokrasi, penyiapan, tata kelola, pelaksanaan, serta pengawasandari seluruh tindakan pemerintah, agar sistem ke pemerintahan di sebuah negara berjalan secara konsisten. Kekonsistenan pada sistem administrasi negara sangat perlu dilakukan agar tujuan dari kegiatan kepemerintahan dapat terlaksana dengan hasil kualitas dan kuanitas yang maksimal sesuai dengan rencana awal kegiatan pemerintah tersebut

Menurut Dimock (dalamNugraha, 2022:15) mengemukakan Administrasi juga termasuk bagian dari proses politik. Hal itu dapat dilihat melalui ilmu yang dipelajari mengenai kekuasaan dari suatu organisasi atau kelembagaan politik dari suatu negara serta proses kegiatan ketatanegaraan yang dapat berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu. Kekuasaan badan perwakilan politik dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan

pemerintah bidang legislatif, eksekutif, dalam koordinasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan ataupun sebagian.

Menurut Juharni (2015:22) administrasi negara didefinisikan sebagai suatu proses yang meliputi pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan pemerintahan. ia menjelaskan berbagai aspek administrasi negara, termasuk sejarah, ciri-ciri, dan kekhususan administrasi dalam konteks pemerintahan. Secara lebih spesifik, Juharni menekankan bahwa administrasi negara berfokus pada bagaimana pemerintah menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien dalam rangka melayani masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Buku ini juga membahas perkembangan studi administrasi negara serta teori-teori yang mendasarinya.

Menurut Harry Mulya Zein dan Sisca Septiani (2023:82) administrasi negara didefinisikan sebagai proses pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien. Mereka membahas berbagai aspek penting dari administrasi negara, termasuk teori-teori dasar, fungsi-fungsi administrasi, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks pemerintahan modern. Dengan demikian, administrasi negara tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

2.1.2 Teori Kebijakan

Menurut Chandler dan Plano (dalam Papilaya, 2020:5) kebijakan publik merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Menurutnya, kebijakan

publik merupakan bentuk intervensi negara untuk melindungi kepentingan masyarakat (kelompok) yang kurang beruntung. Dari definisi Chandler dan Plano, kebijakan publik masuk dalam lapis pemaknaan kebijakan publik sebagai intervensi dari pemerintah. Optimalisasi kebijakan public kemudian ada pada ranah sumber daya berupa sistem dalam masyarakatnya, sehingga kebijakan publik akan menghasilkan output yang berfungsi mensinergikankebijakan tersebut.

Menurut Udin (2017:9) kebijakan publik sangat berkait dengan administasi negara ketika publik aktor mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara.

Menurut Syahruddin (2018:3) kebijakan publik merupakan output utama dari pemerintah, karena itu fokus utama administrasi publik adalah kebijakan publik. Administrasi publik, dipandang sebagai proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan keputusan dalam kebijakan publik.

Secara realita kebijakan publik dalam konteks tersebut diidentikkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tanggung jawah negara atau pemerintah terhadap warga negara. Semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya dapat disebut sebagai suatu kebijakan publik. Pandangan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah memiliki

kewenangan untuk bersikap atau melakukan tindakan sebagai respon terhadap suatu keadaan.

Menurut Farid Wajdi dan M. Hum Andryan, 2022:4) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk mela kukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

Carl Federick (dalam Leo Agustino, 2014:87) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu langkungan tertentu di mana dapat hambatan hambatan (kesulitan kesulitan) dan kesempatan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebur dalam rangka mencapai tujuan tertentu Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebiakan melihatkan perilaku yang memibki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun keboakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikeriakan daripada apo yang dawulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Konsepsi kebijakan publik tersebut mengandung unsur berikut:

1. Pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
2. Melakukan sesuatu itu adalah mengatasi permasalahan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan orang banyak.

Dengan mempelajarı kebijakan publik maka dapat memahami isi kebijakan publik atau yang dibuat pemerintah, menilai dampak dari kekuatan kekuatan lingkungan, menganalisis akibat darı pengaturan berba gau kelembagaan, proses

proses politik, meneliti dan mengevaluasi dampak kebijakan publik terhadap sistem sosial politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya, sekaligus terhadap negara.

Menurut Didin Muhafidin dan Yadiman (2020:29) kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Kebijakan publik mencakup tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi isu-isu yang berdampak luas pada masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan publik. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Maulana Dan Rosmayanti (2020:7) kebijakan publik merupakan suatu hal yang diputuskan oleh pemerintah, baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan publik sangatlah penting karena menyangkut kepentingan orang banyak

2.1.3 Teori Manajemen Strategis

Manajemen strategis merupakan salah satu teori penting dalam memahami bagaimana suatu organisasi merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Dalam konteks pemerintahan desa, teori ini membantu menjelaskan bagaimana desa mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, termasuk transformasi digital yang tengah berlangsung di era modern.

Dalam pandangan Sanjay Dhir dan Sushil (2024), “Konsep fleksibilitas strategis dan inovasi menjadi kunci utama agar organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat.” Mereka menekankan bahwa strategi yang efektif tidak lagi bersifat kaku, tetapi harus fleksibel dan inovatif agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan. Hal ini sangat relevan bagi pemerintah desa, yang dituntut mampu berinovasi dalam mengembangkan pelayanan publik berbasis digital meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya.

Teori manajemen strategis berfokus pada proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi.menurut rangkuti (2016:12) manajemen strategis adalah proses yang meliputi perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan memanfaatkan kekuatan internal untuk mencapai tujuan jangka panjang. Rangkuti menegaskan bahwa strategi bukan hanya rencana tertulis, melainkan tindakan nyata yang harus dijalankan secara konsisten untuk menjawab tantangan lingkungan organisasi.

Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Desa Bumi Mulya dituntut untuk merumuskan strategi digital, melaksanakan langkah digitalisasi, dan mengevaluasi hasilnya, sebagaimana diuraikan oleh Rangkuti. Dengan demikian, teori Rangkuti memberikan dasar bahwa digitalisasi desa harus dirancang melalui proses strategis yang terarah, bukan bersifat spontan atau tanpa perencanaan.

Umar (2019:44) menjelaskan bahwa strategi adalah keputusan menyeluruh yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal. Artinya, penyusunan strategi harus didasarkan pada pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) yang dihadapi organisasi.

Kutipan ini sangat relevan karena Pemerintah Desa Bumi Mulya juga menghadapi keterbatasan internal seperti SDM yang belum menguasai teknologi, serta ancaman eksternal seperti akses internet yang lemah. Konsep Umar menegaskan bahwa strategi digital desa harus lahir dari analisis lingkungan yang nyata, bukan sekadar meniru kebijakan desa lain.

Dalam konteks penelitian ini, teori manajemen strategis digunakan untuk memahami bagaimana Pemerintah Desa Bumi Mulya menyusun dan menerapkan strategi digitalisasi yang meliputi perencanaan (pemetaan kebutuhan digital), implementasi (pelatihan aparatur dan penyediaan infrastruktur), serta evaluasi (penilaian efektivitas digitalisasi). Dengan teori ini, dapat diketahui sejauh mana strategi desa bersifat terencana atau justru bersifat adaptif terhadap kondisi di lapangan.

2.1.4 Teori Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah cara organisasi, pemerintah, bisnis, atau masyarakat bekerja agar menjadi lebih efektif, efisien, cepat, dan inovatif. Transformasi digital bukan hanya mengganti alat manual menjadi digital, tetapi juga mengubah budaya kerja, pola pikir, proses layanan, dan strategi organisasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi.

Menurut Indrajit (2017:21), transformasi digital merupakan proses integrasi teknologi informasi ke dalam seluruh aktivitas organisasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan. Indrajit menekankan bahwa teknologi digital harus digunakan sebagai alat untuk mempercepat proses kerja dan memperbaiki pelayanan publik. Pemerintah Desa Bumi Mulya sedang berupaya mengintegrasikan teknologi seperti Sistem Informasi Desa (SID), layanan surat online, dan komunikasi berbasis media sosial. Kutipan Indrajit memberikan landasan bahwa digitalisasi desa dilakukan bukan semata-mata untuk mengikuti tren, tetapi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik desa.

Sulastri (2020:5) menyatakan bahwa digitalisasi bukan hanya persoalan penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan pola kerja, penyesuaian budaya organisasi, dan transformasi perilaku sumber daya manusia. Ia menegaskan bahwa tanpa perubahan budaya, digitalisasi tidak akan berjalan optimal. Ini sesuai dengan kondisi Desa Bumi Mulya, di mana perangkat desa masih terbiasa bekerja secara manual. Perubahan budaya kerja seperti mulai terbiasa menggunakan komputer, internet, dan aplikasi digital menjadi bagian penting dari strategi digital yang harus dirancang pemerintah desa

Wicaksono (2021:33) menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat ditentukan oleh tiga faktor utama:

1. Kesiapan SDM,
2. Infrastruktur digital,
3. Kepemimpinan yang visioner dan mampu mendorong perubahan.

Jika salah satu komponen ini lemah, maka proses digitalisasi akan berjalan lambat dan tidak optimal.Pemerintah Desa Bumi Mulya masih menghadapi dua hambatan besar yang disebut Wicaksono, yaitu:

1. SDM yang belum menguasai teknologi,
2. Infrastruktur internet yang lemah.

Kutipan ini memperkuat analisis bahwa strategi desa harus mencakup pelatihan SDM, penguatan infrastruktur internet, serta kepemimpinan kepala desa yang mampu mendorong transformasi digital secara bertahap

Menurut Verhoef et al. (2021), transformasi digital merupakan proses jangka panjang yang mengubah cara organisasi menciptakan nilai melalui integrasi teknologi digital ke dalam seluruh fungsi dan aktivitasnya. Mereka juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat transformasi digital.

Menurut Fitzgerald et al. (2014), transformasi digital terjadi ketika organisasi menggunakan teknologi untuk memperluas kemampuan strategis, bukan hanya untuk efisiensi operasional. Mereka menekankan pentingnya kepemimpinan digital dan kesiapan budaya organisasi dalam keberhasilan transformasi digital

Dalam penelitian ini, teori transformasi digital digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Desa Bumi Mulya mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam tata kelola desa. Transformasi digital diharapkan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperluas partisipasi masyarakat, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa

2.1.5 Teori Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur untuk menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan guna mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi.

Menurut Laudon dan Laudon, Sistem Informasi Manajemen adalah sistem yang menyediakan informasi yang dibutuhkan organisasi untuk mendukung operasi, pengendalian, analisis, dan pengambilan keputusan. Melalui SIM, organisasi dapat mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

Menurut Abdul Kadir, Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi bagi manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

Dalam pemerintahan desa, Sistem Informasi Manajemen diwujudkan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID), pengelolaan data kependudukan, administrasi surat-menyurat secara digital, serta penyediaan informasi kepada masyarakat. Penerapan SIM bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data, dan mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam penelitian ini, teori Sistem Informasi Manajemen digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Desa Bumi Mulya memanfaatkan sistem informasi dalam mendukung transformasi digital. Keberhasilan strategi

transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa mengelola informasi secara efektif melalui sistem informasi yang terintegrasi

2.1.6 Teori Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan paling dasar yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Ndraha (2011:42) menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah organisasi yang dibentuk untuk mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan nilai lokal, adat istiadat, serta ketentuan hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa desa mempunyai karakteristik sosial dan budaya yang unik, sehingga setiap kebijakan dan strategi pemerintah desa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Sejalan dengan itu, Sutoro Eko (2015:18) menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan bentuk local self-government, yaitu pemerintahan lokal yang mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Konsep ini menegaskan bahwa desa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, tetapi memiliki ruang otonomi untuk merancang strategi, termasuk strategi dalam menghadapi era digital.

Koentjaraningrat (2005) menambahkan bahwa pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan budaya masyarakatnya. Pemerintahan desa merupakan lembaga yang bergerak dalam dua ranah sekaligus, yaitu administratif dan kultural. Oleh karena itu, perubahan dalam tata kelola desa—termasuk proses digitalisasi—tidak hanya dapat dilihat sebagai perubahan teknis,

tetapi harus mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat desa. Pendapat ini diperkuat oleh Soetardjo (2008) yang menyatakan bahwa desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki fungsi penting sebagai penyambung antara pemerintah dan warga. Pemerintah desa menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, memberikan pelayanan, dan melaksanakan pembangunan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Hadi Pranoto (2017:22), pemerintahan desa pada era modern dituntut untuk mengelola tata pemerintahan secara transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif. Penggunaan teknologi digital merupakan salah satu cara utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengelolaan administrasi desa. Di sisi lain, Jim Ife (2016:55) melihat desa sebagai komunitas yang memiliki kekuatan sosial lokal sehingga pemerintah desa harus mampu memanfaatkan potensi masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan, termasuk perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi digital. Perspektif ini menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur desa, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai subjek perubahan.

Secara regulatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Hal ini berarti desa memiliki legitimasi untuk mengatur strategi pengelolaan layanan berbasis digital sesuai dengan kebutuhan warganya. Lebih jauh, Suyanto (2020:27) menekankan bahwa pemerintah desa merupakan aktor kunci dalam proses transformasi digital, karena

keberhasilan digitalisasi sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan teknologi, serta kemauan pemerintah desa untuk melakukan inovasi digital. Pendapat lain juga disampaikan oleh Dwipayana dan Eko (2020) yang menyatakan bahwa desa pada era modern tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa.

Dikaitkan dengan penelitian ini, teori-teori pemerintahan desa menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana Pemerintah Desa Bumi Mulya merumuskan strategi dalam menghadapi transformasi digital. Pemerintah Desa Bumi Mulya memiliki kewenangan otonom untuk merancang strategi digitalisasi sesuai karakteristik masyarakatnya, sebagaimana dijelaskan dalam konsep local self-government. Selain itu, digitalisasi desa harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Bumi Mulya, sebagaimana ditegaskan oleh Koentjaraningrat dan Ndraha. Pemerintah desa juga berperan sebagai penyelenggara layanan publik terdepan yang dituntut semakin cepat, transparan, dan modern sehingga transformasi digital menjadi keniscayaan. Teori-teori ini juga menegaskan bahwa keberhasilan strategi digital sangat ditentukan oleh kesiapan perangkat desa, kapasitas sumber daya manusia, dukungan masyarakat, serta kepemimpinan kepala desa yang visioner. Dengan demikian, teori pemerintahan desa menjadi kerangka penting untuk menganalisis sejauh mana

Pemerintah Desa Bumi Mulya mampu menyusun dan menerapkan strategi yang efektif dalam menghadapi transformasi digital.

2.1.7 Teori Konsep Pemerintah Desa

Konsep pemerintah desa merupakan pemahaman mengenai kedudukan, peran, dan fungsi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat desa.

Dalam menjalankan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Seiring berkembangnya teknologi informasi, pemerintah desa juga dituntut untuk mampu beradaptasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu bentuk inovasi yang bertujuan mempercepat pelayanan administrasi,

meningkatkan keterbukaan informasi, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*

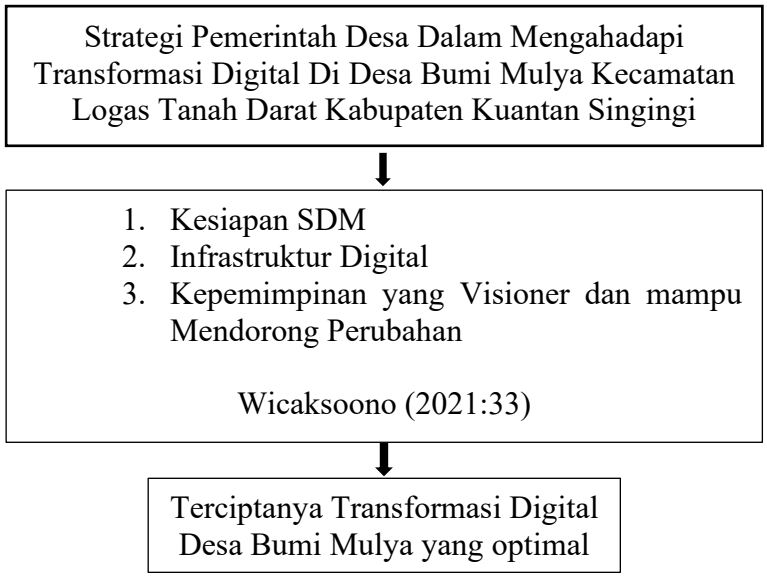
Konsep pemerintah desa dalam penelitian ini difokuskan pada peran Pemerintah Desa Bumi Mulya sebagai pelaksana strategi transformasi digital. Pemerintah desa dipandang sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan maupun program digitalisasi desa. Peran tersebut meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa, penyediaan infrastruktur digital, pengembangan Sistem Informasi Desa (SID), serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Dengan demikian, konsep pemerintah desa dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan di tingkat desa, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam mewujudkan transformasi digital yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa Bumi Mulya

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60) kerangka pemikiran adalah model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting dalam penelitian.

Gambar 2.1: Kerangka pemikiran tentang Srategi Pemerintah Desa DalamMenghadapi Transformasi Digital Di Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat



Sumber : Modifikasi Penelitian 2026

2.3 Hipotesis

Beradasarkan uraian diatas yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas disini, maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu : "Diduga Pemerintah Desa Bumi Mulya belum optimal dalam Menghadapi Strategi Transformasi digital".

2.4 Definisi Operasional

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Strategi Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Transformasi Digital.

2.4.1 Strategi Pemerintah Desa

Yang dimaksud dengan strategi pemerintah desa dalam penelitian ini adalah langkah-langkah atau kebijakan yang dirancang dan dijalankan oleh Pemerintah Desa Bumi Mulya untuk menjawab tantangan dan peluang dalam era digital. Strategi ini bisa berupa perencanaan kegiatan, program kerja, penggunaan teknologi, pelatihan perangkat desa, atau kebijakan administratif yang mendukung

proses digitalisasi pelayanan dan pemerintahan desa Dalam konteks penelitian ini, strategi diukur melalui:

1. Kebijakan atau program yang disusun terkait digitalisasi
2. Langkah implementasi dalam penggunaan teknologi informasi
3. Peran perangkat desa dalam melaksanakan strategi digital
4. Respons terhadap tantangan digitalisasi, seperti keterbatasan SDM dan infransi

2.4.2 Transformasi Digital

Transformasi digital dalam penelitian ini mengacu pada proses perubahan dari sistem kerja manual ke sistem yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan komunikasi desa.

Transformasi digital dapat terlihat melalui Pemanfaatan teknologi, seperti komputer, internet, media sosial, dan Sistem Informasi Desa (SID) kemudian Perubahan tata kelola pelayanan, misalnya pengurusan surat secara online,Kesiapan SDM dalam menggunakan teknologi dan Partisipasi masyarakat dalam sistem digital yang dijalankan oleh pemerintah desa.

2.4.3 Pemerintah Desa

Yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk dalam bidang digitalisasi. Pemerintah desa dalam penelitian ini diamati dari,Kebijakan dan keputusan strategis yang diambil,Tugas pokok dan fungsi perangkat desa dan Peran mereka dalam inovasi pelayanan publik berbasis digital

Dengan definisi operasional di atas, peneliti memiliki pedoman dalam mengkaji fenomena strategi dan transformasi digital secara konkret di lapangan. Hal ini penting agar fokus penelitian tetap terarah dan memudahkan dalam proses pengumpulan, analisis, serta penyimpulan data nantinya

2.5 Operasional Variabel

Operasional variabel adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti tentang bagaimana caranya varaibel. Operational variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1: Konsep Variabel Strategi Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Transformasi Digital di Desa Bumi Mulya Kecamtan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Indikator	Variabel	Ukuran
Teori Transformasi Digital menurut Wicaksono (2021:33)	1. kesiapan SDM	a. kemampuan aparatur desa menggunakan teknologi digital b. sikap dan kesiapan menerima teknologi digital	Sangat Baik Baik Cukup Kurang
	2.Infrastruktur Digital	a. ketersediaan jaringan internet b. ketersediaan perangkat digital	Sangat Baik Baik Cukup Kurang
	3.kepemimpinan yang visioner dan mampu mendorong perubahan	a. visi dan arah kebijakan digital b. pola komunikasi dan motivasi pemimpin	Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah

Sumber: Modifikasi Penelitian 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya strategi yang digunakan oleh pemerintah desa dalam menghadapi transformasi digital. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemasyarakatan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali strategi-strategi yang disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bumi Mulya, baik yang bersifat formal seperti kebijakan atau program desa, maupun yang bersifat informal seperti pendekatan komunikasi, penguatan sumber daya manusia, dan adaptasi sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk masuk ke dalam konteks kehidupan masyarakat desa secara lebih dekat, serta memahami makna tindakan dan kebijakan dari perspektif pelaku atau informan utama seperti kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat.

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi aktual strategi digitalisasi di tingkat desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hambatan, hingga bentuk partisipasi masyarakat. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian

hipotesis atau pengukuran variabel, melainkan pada pemahaman menyeluruh terhadap proses dan dinamika strategi pemerintahan desa dalam merespons perubahan berbasis teknologi.

Dalam praktiknya, peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap kebijakan atau aktivitas desa yang relevan. Hasilnya diharapkan dapat menyajikan gambaran utuh tentang bagaimana pemerintah Desa Bumi Mulya merancang dan menjalankan strategi adaptif terhadap era transformasi digital, serta bagaimana strategi tersebut diterima oleh masyarakat desa yang menjadi sasaran dari digitalisasi tersebut.

Dengan demikian, jenis penelitian kualitatif ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami makna, proses, serta strategi sosial-politik yang digunakan oleh aktor lokal dalam menghadapi perubahan digital, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih kontekstual dan reflektif terhadap perkembangan digitalisasi di tingkat desa

3.2 Informan

Menurut Sugiyono (2017:218). Dalam konteks penelitian, informan adalah individu yang memberikan informasi penting terkait objek atau fenomena yang diteliti. Sugiyono menjelaskan bahwa pemilihan informan yang tepat sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dalam penelitian kualitatif.

Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki peran aktif dan pengalaman langsung dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, serta evaluasi program digitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Bumi Mulya. Selain itu, peneliti juga melibatkan perwakilan dari masyarakat desa yang menjadi penerima atau pengguna layanan digital dari pemerintah desa, sehingga bisa didapat pandangan dari berbagai sisi

Berikut ini adalah kelompok informan yang akan diwawancarai dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 : Informan Penelitian Strategi Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Transformasi Digital Di Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

No	Informan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Kepala Desa	1	10%
2	Sekretaris Desa	1	10%
3	Operator Desa	1	10%
4	Kasi	1	10%
5	Masyarakat	6	60%
Jumlah		10	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2026

Jadi jumlah informan dalan penilitian ini adalah 10 orang, adapun teknik dalam penarikan informan pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling menurut Sugiyono (2017:85) adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Hal ini berarti bahwa peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, untuk memastikan bahwa sampel tersebut relevan dan representatif terhadap tujuan penelitian.

3.3 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2015:156) mengemukakan penelitian data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2017:193) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Ini berarti bahwa data primer diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, seperti melalui wawancara, kuesioner, atau observasi terhadap objek atau fenomena yang diteliti.

3.3.2 Data Skunder

Menurut Sugiyono (2017:137) sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen

3.4 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Bumi Mulya dalam menghadapi transformasi digital, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan digitalisasi di tingkat desa. Transformasi digital yang dimaksud mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan administrasi pemerintahan desa, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui kanal digital.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bumi Mulya, yang terletak di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau

3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka diperlukan suatu teknik pengumpulan data. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

3.6.1 Wawancara

Menurut Sugiyono (2017:194) wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pertemuan antara peneliti dan responden untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam mengenai topik tertentu, teknik ini di maksud mengumpulkan data mengenai strategi pemerintah desa dalam menghadapi transformasi digital di Desa Bumi Mulya Kecamtan Logas Tanah Darat

3.6.2 Obserevasi

Menurut Sugiyono (2017:240) dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan catatan peristiwa yang telah berlangsung. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Ini berfungsi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, memberikan informasi tambahan yang mendukung hasil penelitian

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:203) observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti. Observasi memiliki ciri khas yang membedakannya dari

metode pengumpulan data lainnya, seperti wawancara dan kuesioner, karena observasi tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup objek-objek lain di lingkungan sekitar.

3.7 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:244) metode analisis data adalah proses sistematis yang dilakukan setelah pengumpulan data untuk mengorganisasikan, menyusun, dan menafsirkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber Tahapan dalam menganalisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif, yaitu:

3.7.1 Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2017:249) reduksi data adalah proses yang dilakukan untuk menyaring dan merangkum data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Proses ini bertujuan untuk mengorganisir data yang besar dan kompleks menjadi informasi yang lebih terfokus dan mudah dipahami. Dalam reduksi data, peneliti memilih hal-hal yang penting, mengelompokkan informasi, serta mencari tema dan pola dari data yang ada. Sugiyono menjelaskan bahwa reduksi data berlangsung secara terus-menerus sepanjang proses penelitian, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi data mana yang relevan dan mana yang tidak diperlukan. Dengan demikian, reduksi data membantu peneliti untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3.7.2 Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2019:249) penyajian data adalah langkah dalam analisis data yang dilakukan setelah proses reduksi data. Penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi secara sistematis sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2017:245) penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data yang dilakukan setelah proses penyajian data. Dalam konteks penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan ini dapat mencakup temuan-temuan baru yang muncul selama penelitian dan harus didukung oleh bukti-bukti yang valid. Sugiyono menjelaskan bahwa kesimpulan awal yang ditarik bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh data yang kuat. Namun, jika kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang konsisten dan valid, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Penjelasan ini menunjukkan pentingnya proses verifikasi dalam penarikan kesimpulan untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 :Jadwal kegiatan penelitian tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Transformasi Digitaal Di Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025																							
		September				Oktober				November				Desembr				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal																								
2	Pembuatan Proposal																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Revisi Proposal																								
6	Pembuatan Skripsi																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Sidang Skripsi																								
9	Revisi Skripsi																								

Sumber Modifikasi Penelitian Tahun 2026

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Bumi Mulya

Desa Bumi Mulya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Desa ini memiliki wilayah administratif yang terdiri dari area pemukiman penduduk, lahan pertanian dan Perkebunan.secara umum,kondisi wilayah desa relatif datra dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan ekonomi sehari-hari.

Secara geografis, Desa Bumi Mulya dapat diakses melalui jalur darat dengan kondisi jalan desa yang sudah tersedia, meskipun pada beberapa bagian masih memerlukan perbaikan. Letak desa yang tidak tergolong terpencil memungkinkan terjadinya interaksi sosial dan ekonomi dengan desa sekitar maupun pusat kecamatan.

Penduduk Desa Bumi Mulya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun, sedangkan sebagian lainnya bekerja di sektor informal dan jasa. Pola pemukiman masyarakat tersebar mengikuti akses jalan desa dan area lahan pertanian, dengan hubungan sosial antarwarga yang masih kuat dan bersifat kekeluargaan.

Dari segi sosial kemasyarakatan, masyarakat Desa Bumi Mulya memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, namun mayoritas berada pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kehidupan masyarakat desa

masih didominasi oleh aktivitas tradisional, baik dalam kegiatan ekonomi maupun sosial.

Pemerintahan Desa Bumi Mulya berkedudukan di kantor desa sebagai pusat pelayanan dan administrasi desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4.2 Demografi

4.2.1 Batas Wilayah Desa

Secara administratif, Desa Bumi Mulya memiliki batas wilayah yang jelas dengan desa desa di sekitarnya.adapun batas wilayah desa bumi mulya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beringin Jaya
2. Sebelah Timur berbatsan dengan Desa Giri Sako
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuatan Sako
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Jaya

4.2.2 Luas Dan Jarak Wilayah

Luas wilayah desa Bumi Mulya Adalah 35 km^2 yang terdiri dari Kawasan pemukiman penduduk,lahan pertanian,dan Perkebunan. Secara geografis Desa Bumi Mulya berada pada jarak sekitar kurang lebih 10 km dari pusat pemerintah kecamatan Logas Tanah Darat jarak tersebut dapat ditempuh melaui jalur darat dengan waktu tempuh kurang lebih 20-30 menit ,tergantung kondisi jalan dan cuaca, sementara itu jarak Desa Bumi Mulya ke pusat pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi (Teluk Kuantan) sekitar kurang lebih 45-50 km dengan waktu tempuh 1,5 hingga 2 jam perjalanan.

4.2.3 Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Kuantan Singingi, jumlah penduduk Desa Bumi Mulya tercatat sebanyak 2.218 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki berjumlah 1.166 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 1.052 jiwa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	1166	52,57%
2	Perempuan	1052	47,43%
Jumlah		2218	100%

Sumber: Desa Bumi Mulya 2026

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk masyarakat Desa Bumi Mulya Keacamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak jumlah laki laki dari pada perempuan, adapun laki-laki 1116 orang dengan persentase 52,57% sedangkan perempuan 1052 orang dengan persentase 47,43%

4.2.4 Keagamaan

Berdasarkan data administrasi kependudukan Desa Bumi Mulya, mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Dari total jumlah penduduk sebanyak 2.218 jiwa, penduduk yang beragama Islam berjumlah sekitar 2.180 jiwa. Sementara itu,

penduduk yang memeluk agama lain seperti Kristen dan Katolik berjumlah sekitar 38 jiwa

Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Bumi Mulya

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Islam	2180	98,29 %
2	Kristen / Katolik	38	1,71 %
Jumlah		2218	100 %

Sumber : Data Desa Bumi Mulya 2026

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Bumi Mulya beragama Islam dengan persentase 98,29% sedangkan Agama kristen / katolik hanya 1,71%. Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah didukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan ibadah, sarana rumah ibadah di desa Bumi Mulya sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Rumah Ibadah Desa Bumi Mulya

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Jumlah Masjid	3
2	Jumlah Mushola	3
3	Jumlah Gereja	1
Jumlah		**7**

Sumber : Data Desa Bumi Mulya 2026

Dapat dilihat pada tabel di atas di Desa Bumi Mulya terdapat cukup sarana untuk melaksanakan ibadah. Yang mayoritas beragama islam yaitu mushola dan mesjid ini selain untuk tempat ibadah juga difungsikan sebagai tempat mengaji

anak anak sekolah kemudian mayoritas beragama kristen dan katolik juga memiliki gereja yang dimana digunakan sebagai tempati ibadah.

4.2.5 Fasilitas Umum

Untuk melihat fasilitas umum apa saja yang ada di Desa Bumi Mulya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Jumlah fasilitas Umum di Desa Bumi Mulya

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK / PAUD	1
2	Gedung PDTA	1
3	SD / MI	1
4	Lapangan Sepak Bola	1
5	Lapangan Volly	1
Jumlah		**5**

Sumber : Data Desa Bumi Mulya 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa fasilitas umum masyarakat desa bumi mulya cukup memadai, diharapkan kedepannya pemerintah meningkatkan fasilitas umum ini.

4.3 Kondisi Pemerintah Desa Bumi Mulya

Pemerintahan Desa Bumi Mulya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh

perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Pemerintahan Desa Bumi Mulya terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, serta perangkat pendukung lainnya. Masing-masing perangkat desa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kantor desa menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan pelayanan administrasi desa.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, Pemerintah Desa Bumi Mulya melayani berbagai kebutuhan administrasi masyarakat, seperti pengurusan surat keterangan, pendataan kependudukan, serta pelayanan administrasi lainnya. Pelayanan tersebut dilakukan secara langsung di kantor desa dan masih didominasi oleh sistem manual, meskipun pada beberapa aspek telah mulai mengenal penggunaan teknologi sederhana.

Dari segi sumber daya manusia, aparatur Pemerintah Desa Bumi Mulya memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan yang beragam. Sebagian perangkat desa telah mampu menggunakan perangkat teknologi seperti komputer dan telepon pintar dalam mendukung pekerjaan administrasi, namun pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal dan merata di seluruh bidang pelayanan desa.

Kondisi pemerintahan Desa Bumi Mulya tersebut menjadi gambaran awal dalam melihat kesiapan pemerintah desa dalam menghadapi perkembangan dan perubahan, khususnya terkait dengan transformasi digital. Oleh karena itu, kondisi

ini menjadi dasar penting dalam mengkaji strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bumi Mulya dalam menghadapi transformasi digital di tingkat desa.

4.4 Strategi Pemerintah Desa Bumi Mulya dalam Menghadapi Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan suatu proses perubahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, Pemerintah Desa Bumi Mulya menyusun dan melaksanakan berbagai strategi secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan desa.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bumi Mulya tidak terlepas dari struktur organisasi, sumber daya manusia, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Pemerintah desa berupaya menyesuaikan pola kerja pemerintahan yang sebelumnya bersifat manual menuju pemanfaatan teknologi digital secara sederhana namun berkelanjutan.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah penguatan peran perangkat desa sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Pembagian tugas dan fungsi yang jelas menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan dan administrasi desa, termasuk dalam penggunaan teknologi untuk mendukung pekerjaan perangkat desa. Kepala Desa berperan sebagai pengambil kebijakan, sedangkan perangkat desa menjalankan kebijakan tersebut dalam kegiatan administrasi dan pelayanan masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Desa Bumi Mulya mulai mendorong pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan desa, seperti penggunaan komputer untuk pengolahan data kependudukan, penyusunan surat-menyurat, serta pendokumentasian arsip desa. Penggunaan telepon pintar juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antarperangkat desa dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Strategi lainnya adalah peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menghadapi perkembangan teknologi. Meskipun belum dilakukan secara formal dan terstruktur, pemerintah desa mendorong perangkat desa untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi dalam pekerjaan administrasi. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan pelayanan publik yang semakin berkembang.

Pemerintah Desa Bumi Mulya juga berupaya membuka diri terhadap inovasi dan perubahan, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan sarana teknologi dan kemampuan sumber daya manusia. Namun demikian, langkah-langkah yang telah dilakukan menunjukkan adanya kesadaran pemerintah desa akan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa.

Secara keseluruhan, strategi Pemerintah Desa Bumi Mulya dalam menghadapi transformasi digital masih berada pada tahap awal dan bersifat bertahap. Strategi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk terus beradaptasi dan mengembangkan pemanfaatan teknologi secara lebih optimal di masa mendatang.

4.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Transformasi Digital di Desa Bumi Mulya

4.5.1 Faktor Pendukung Transformasi Digital

Salah satu faktor pendukung transformasi digital di Desa Bumi Mulya adalah adanya komitmen dari pemerintah desa, khususnya Kepala Desa dan perangkat desa, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pemanfaatan teknologi menjadi dasar dalam mendorong perubahan pola kerja pemerintahan desa.

Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya perangkat teknologi dasar, seperti komputer dan telepon pintar, yang mulai dimanfaatkan dalam kegiatan administrasi dan komunikasi pemerintahan desa. Selain itu, sebagian aparatur desa telah memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi, sehingga memudahkan proses adaptasi terhadap perubahan digital.

Hubungan sosial masyarakat yang baik serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa juga menjadi faktor pendukung. Kondisi ini mempermudah pemerintah desa dalam memperkenalkan dan menerapkan perubahan, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.

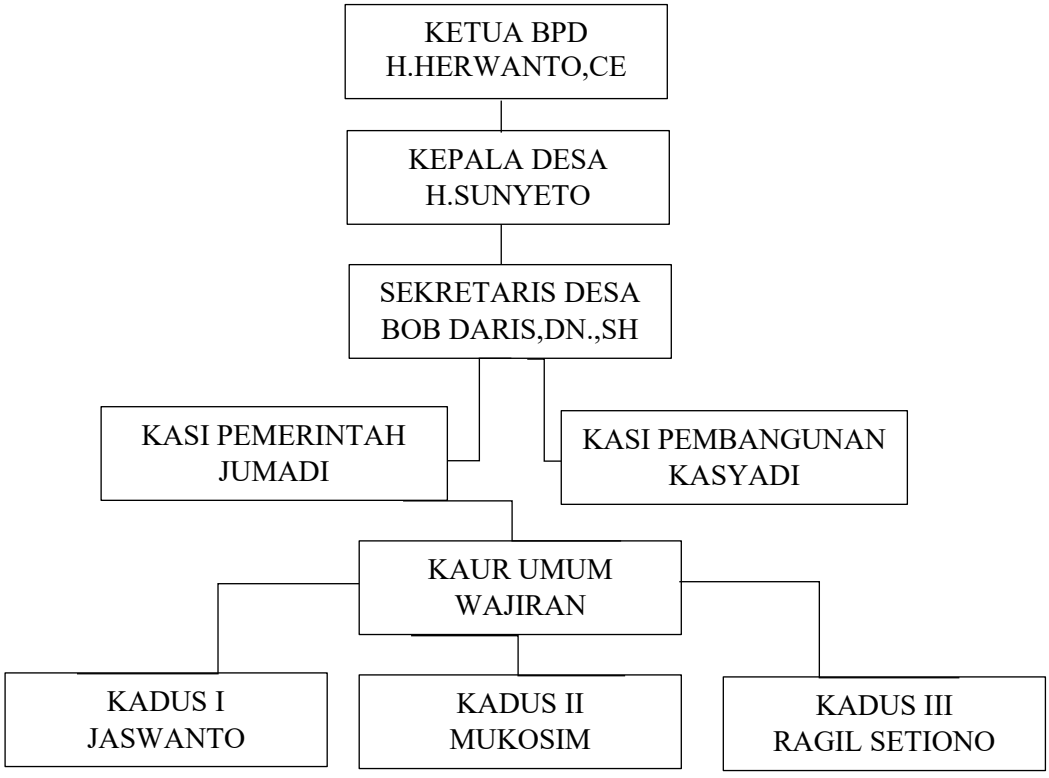
4.5.2 Faktor Penghambat Transformasi Digital

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat transformasi digital di Desa Bumi Mulya. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi yang belum merata di kalangan aparatur desa. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan teknologi belum dapat dilakukan secara optimal.

Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi juga menjadi faktor penghambat, seperti jumlah perangkat teknologi yang masih terbatas dan belum adanya sistem digital yang terintegrasi. Selain itu, keterbatasan anggaran desa turut mempengaruhi kemampuan pemerintah desa dalam mengembangkan sarana pendukung transformasi digital.

Faktor lainnya adalah masih adanya kebiasaan kerja secara manual yang sudah berlangsung lama, sehingga membutuhkan waktu dan proses adaptasi dalam penerapan sistem kerja berbasis digital. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam mendorong perubahan menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern.

4.5.3 Struktur Organisasi Desa Bumi Mulya



Sumber: Desa Bumi Mulya 2026

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa strategi Pemerintah Desa dalam menghadapi transformasi digital di Desa Bumi Mulya masih belum optimal. Strategi yang telah direncanakan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan transformasi digital karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, implementasi kebijakan, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang menyeluruh melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan infrastruktur digital, evaluasi kebijakan secara berkala, serta dukungan yang berkesinambungan dari pemerintah daerah agar tujuan transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal.

6.2 Saran

1. Diharapkan Pemerintah Desa Bumi Mulya dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur desa dalam bidang teknologi informasi melalui pelatihan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Diharapkan juga pemerintah desa mampu mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) serta layanan digital yang telah tersedia agar tidak lagi bergantung pada sistem manual dalam pelayanan administrasi. Selain itu, diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan layanan digital serta manfaatnya, sehingga masyarakat lebih memahami dan mau memanfaatkannya. Diharapkan pula adanya komitmen yang kuat dari aparatur

desa untuk mengubah pola kerja dari sistem konvensional menuju sistem digital secara bertahap dan konsisten.

2. Diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang lebih maksimal terhadap pelaksanaan transformasi digital di desa, khususnya dalam penyediaan infrastruktur jaringan internet yang stabil dan merata. Diharapkan pula pemerintah daerah dapat memberikan pendampingan teknis serta pembinaan secara berkelanjutan kepada aparatur desa agar mampu mengelola dan mengembangkan sistem digital secara mandiri. Selain itu, diharapkan adanya kebijakan yang lebih konkret dan aplikatif guna mempercepat proses digitalisasi desa secara merata.
3. Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital, khususnya dalam mengakses layanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah desa. Diharapkan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mendukung program digitalisasi desa dengan mulai beradaptasi terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem digital. Dengan demikian, diharapkan transformasi digital di Desa Bumi Mulya dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Aneta, A. (2012). Pengantar Administrasi Negara. Jakarta: Gramedia.

Agustino, L. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Chandler, R. C., & Plano, J. C. (2020). *The Public Administration Dictionary. New York: Wiley.*

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: SAGE Publications*.

Dhir, S., & Sushil. (2024). *Strategic Flexibility and Innovation in Modern Organizations. New Delhi: Springer*.

Didin Muhafidin, & Yadiman. (2020). Kebijakan Publik: Teori dan Implementasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Dimock, M. (Dalam Nugraha, 2022). *Public Administration*. New York: Harper & Row.

Farid Wajdi, & Andryan, M. H. (2022). Kebijakan Publik: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Indrajit, R. E. (2017). Transformasi Digital dalam Pemerintahan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Juharni. (2015). Administrasi Negara: Konsep dan Perkembangan. Bandung: Alfabeta.

Maulana, H., & Rosmayanti. (2020). Kebijakan Publik dalam Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Deepublish.

Mulya Zein, H., & Septiani, S. (2023). Administrasi Negara Modern. Bandung: Alfabeta.

Nugraha, R. (2022). Administrasi Negara: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana.

Papilaya, Y. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rangkuti, F. (2016). Manajemen Strategis: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kombinasi *(Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta.

Syahruddin. (2018). Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi. Makassar: CV Sah Media.

Udin, S. (2017). Kebijakan Publik dalam Administrasi Negara. Bandung: Alfabeta.

Umar, H. (2019). *Strategic Management in Government Sector*. Jakarta: Gramedia.

Wicaksono, A. (2021). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Sulastri, S. (2020). Digitalisasi Pemerintahan Desa. Bandung: Alfabeta.

Dwipayana, A., & Eko, S. (2020). Desa Membangun Indonesia: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Yogyakarta: FPPD.

Eko, S. (2015). Desa Membangun Indonesia: Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: IRE Press.

Hadi Pranoto. (2017). Administrasi Pemerintahan Desa di Era Modern. Jakarta: Rajawali Pers.

Ife, J. (2016). Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Koentjaraningrat. (2005). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Ndraha, T. (2011). Konsolidasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Aksara.

Soetardjo. (2008). Pemerintahan Desa dan Masyarakat. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suyanto. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa di Era Digital. Yogyakarta: Gava Media.

Agustino, L. (2016). Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Dwiyanto, A. (2015). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: IRE Press.

Hamdi, M. (2014). Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hidayat, A. (2018). Manajemen Strategik Pemerintahan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Indrajit, R. E. (2016). Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2017). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Osborne, D., & Gaebler, T. (2005). Reinventing Government. Jakarta: PPM.

Rangkuti, F. (2018). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia.

Siagian, S. P. (2015). Manajemen Strategik. Jakarta: Bumi Aksara.

Sutoro, E. (2017). Membangun Desa Menata Kota. Yogyakarta: IRE Press.

Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

B. Jurnal / Artikel Ilmiah

Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., & Welch, M. (2014). *Embracing digital technology: A new strategic imperative. MIT Sloan Management Review, 55(2), 1–12.*

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). *Digital transformation: A multidisciplinary perspective. Journal of Business Research, 122, 889–901.*

Arifin, Z. (2020). Transformasi digital dalam pelayanan publik desa. Jurnal Administrasi Publik, 11(2), 145–156.

Huda, M., & Yunas, N. (2021). Digitalisasi desa dan tantangan tata kelola pemerintahan lokal. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 23–35.

Prabowo, A., & Nugraheni, D. (2019). Strategi pemerintah desa dalam pengembangan sistem informasi desa. Jurnal Administrasi Negara, 8(1), 66–78.

Putri, R. A., & Wijaya, A. (2022). Literasi digital aparatur desa dalam mendukung pelayanan publik. Jurnal Governance, 7(2), 101–112.

Rahmawati, D. (2020). Peran kepemimpinan desa dalam menghadapi era digital. Jurnal Otonomi Daerah, 10(1), 55–67.

Sari, N., & Kurniawan, T. (2021). Inovasi pelayanan publik berbasis digital di pemerintahan desa. Jurnal Kebijakan Publik, 12(2), 89–104.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Sekretaris Desa



Wawancara dengan Kasi Desa



Wawancara Dengan Operator Desa



Wawacara dengan Masyarka

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 0[illegible]/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, tekhnolo gi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Ahkhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menunjuk :

a. Pembimbing I : Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
NIDN : 1002059002
b. Pembimbing II : Sahri Muharam, S.Sos., M.Si
NIDN : 1021117906

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :
Nama : Erva Ade Lestari
NPM : 220411053
Judul Skripsi : Strategi Pemerintahan Desa dalam Menghadapi Transformasi Digital di Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025
Dekan,

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1020058402

Tembusan :
1. *Ketua Program Studi Administrasi Negara*
2. *Mahasiswa*
3. *Arsip*

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT
KANTOR KEPALA DESA BUMI MULYA
Jl. Syarif Kasim No : 001 Kode Pos 29561

SURAT BALASAN PENELITIAN
Nomor : 008/BM-14/SKTM/IV/2026

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: **H. SUNYETO,S.Pd.I**
Jabatan	: Kepala Desa
Alamat	: RT 005/RW 002, Desa Bumi Mulya,Kec.Logas Tanah Darat,Kab Kuantan Singngi

Menerangkan Bahwa,

Nama	: **ERVA ADE USTARI**
Tempat/Tgl.Lahir	: Kuantan Sako,7Agustus 2002
Nomor Pokok Mahasiswa	: 220411026
Fakultas / program studi	: Ilmu Sosial / Administrasi Negara
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Kuantan Singingi

Telah kami setujui untuk melaksanakan penelitian pada instansi kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

"Strategi Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Transformasi Digital Di Desa Bumu Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi"

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih

BUMI MULYA, 03 APRIL 2026
KEPALA DESA BUMI MULYA

KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT
DESA BUMI MULYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

H. SUNYETO, S.Pd.I

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Erva Ade Ustari
NPM : 220411026
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : **Strategi Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Transformasi Digital di Desa Bumi Mulya Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi**

Hari/Tgl Ujian : Rabu/ 17 Juni 2026

Dinyatakan sudah melakukan Revisi atas Skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Anggota 1	3.
4.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Anggota 2	4.
5.	Rika Ramdhanti, S.IP.,M.Si	Anggota 3	5.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Erva Ade Ustari
Tempat/Tgl Lahir	: Kuatan Sako,7 Agustus 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Desa Bumi Mulya, Kec Logas Tanah Darat
Pendidikan	:1.SD 011 Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singngi
	2. SMPN 05 LTD, Kecamatan Logas Tanah Darat,Kabupaten Kuantan Singngi
	3. SMK N 1 Taluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah,Kabupaten Kuantan Singingi

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup Saya ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Taluk Kuantan,27 April 2026

Penulis

Erva Ade Ustari